PERAN PARTAI POLITIK (PARPOL) DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI

Oleh:

I Gede Putu Mantra¹

E-mail: gedeputumantra@gmail.com

Dosen Fakultas Dharma Duta

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Abstract

Corruption is a crime against humanity which is classified as an extraordinary crime. The reform movement that took place in 1998 was motivated by public distrust of the ruling government at that time which was thought to be full of collusion, corruption and nepotism (KKN). After the government in power at that time fell, it was followed by a reformation government. One of the agendas of the reform government is the Eradication of Collusion, Corruption and Nepotism (KKN). Various efforts have been made by the government in preventing and eradicating corruption but corruption is still growing. In the midst of rampant corruption committed by public officials, who in fact mostly come from Political Party cadres, it is only natural for political parties (Parpol) to take responsibility and play a role in anti-corruption measures. Through this paper the author tries to look at the factors behind public officials committing acts of corruption, most of which are thought to come from political party cadres (parpol) and see the role of political parties in the prevention and eradication of corruption.

From the above discussion, it can be concluded that all efforts and actions through various approaches have been made by law enforcement officials to prevent and eradicate corruption that has been running for years in this country. The responsibility of political parties (parpol) can be started from the recruitment of party cadres before being distributed to various public positions in the government. Political parties are also responsible for cadres who are involved in criminal acts of corruption by not obstructing law enforcers in the investigation and investigation process carried out.

Keywords: Political parties, prevention and eradication of corruption.

Abstrak

Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang di golongankan sebagai kejahatan yang luar biasa. Gerakan reformasi yang terjadi tahun 1998 dilatarbelakangi oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang berkuasa pada saat itu yang ditenggarai penuh dengan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Setelah pemerintahan yang berkuasa saat itu jatuh dilanjutkan dengan pemerintahan reformasi. Salah satu agenda dari pemerintahan reformasi adalah Pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi akan tetapi korupsi masih saja tumbuh. Di tengah makin maraknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik yang notabene sebagian besar berasal dari kader-kader Partai Politik, sudah sewajarnya partai politik (Parpol) ikut bertanggungjawab dan berperan dalam tindakan penanggulangan korupsi. Melalui tulisan ini penulis mencoba melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi pejabat publik melakukan perbuatan korupsi

yang sebagian besar ditengarai berasal dari kader-kader partai politik (parpol) serta melihat peran partai politik dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dari pembahasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa segala upaya dan tindakan melalui berbagai pendekatan telah dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang sudah berjalan bertahun-tahun di negara ini. Tanggungjawab partai politik (parpol) dapat dimulai dari rekrutmen kader partai sebelum didistribusikan ke berbagai jabatan publik di pemerintahan. Partai politik juga bertanggungjawab terhadap kader yang terlibat tindak pidana korupsi dengan tidak menghalangi penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan.

Kata Kunci : Partai politik, pencegahan dan pemberantasan korupsi.

PENDAHULUAN

Korupsi masih saja terjadi, bahkan hampir setiap hari di media televisi dan media cetak memuat berita tentang korupsi baik yang dilakukan oleh Kepala Daerah, oknum birokrat maupun yang dilakukan oleh oknum anggota legislatif. Hampir sebagian besar kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah berasal dari partai politik, oleh karena itu sudah sewajarnya partai politik mempunyai tanggungjawab moral dalam penanggulangan dan pemberantasan korupsi.

Gerakan reformasi yang terjadi tahun 1998 dilatarbelakangi oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan orde baru yang berkuasa selama lebih kurang 32 tahun yang ditengarai penuh dengan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Setelah Orde Baru jatuh dilanjutkan dengan pemerintahan reformasi dimana salah satu agendanya adalah Pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi tetapi korupsi masih saja tumbuh, bahkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terbukti dari adanya

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap beberapa kepala daerah dan anggota legislatif di berbagai daerah di Indonesia, Hal ini menunjukkan korupsi di bumi Indonesia masih marak terjadi. Biaya politik yang tinggi diduga sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala daerah maupun yang dilakukan anggota legislatif. Melihat besarnya biaya politik yang dikeluarkan oleh seseorang yang terpilih baik sebagai kepala daerah maupun yang terpilih sebagai anggota legislatif tentu setelah terpilih mereka berpikir bagaimana cara mengembalikan uang yang mereka telah keluarkan dalam pemilihan kepala daerah atau dalam pemilu legislatif. Kondisi yang demikian dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi.

Di tengah makin maraknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik yang notabene sebagian besar berasal dari kader-kader Partai Politik, sudah sewajarnya partai politik (Parpol) berperan aktif dalam tindakan penanggulangan dan pemberantasan korupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, dengan mengkaji literature serta bahan-bahan hukum yang digunakan sebagai data primer dalam menganalisis permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini.

PEMBAHASAN

1. Partai Politik

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, peranan partai politik sangat penting sebagai penghubung dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi ada pandangan yang menganggap partai politik tersebut hanyalah merupakan kendaraan politik bagi sekelompok elit yang berkuasa. Terlepas dari itu semua diakui atau tidak keberadaan partai politik merupakan unsur yang sangat penting untuk menjaga kesetabilan dalam sebuah negara yang demokratis.

Dalam pasal 1 UU No. 2 Tahun 2011 yang merupakan perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik disebutkan bahwa:

Partai Politik merupakan sebuah organisasi yang bersifat nasional maupun juga dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak atau cita-cita untuk memperjuangkan serta membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta dapat memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Disamping pengertian partai politik sebagaimana disebutkan dalam UU No. 2 Tahun 2011, ada beberapa ahli politik yang memberikan pengertian tentang partai politik:

Miriam Budiardjo mengemukakan, bahwa partai politik adalah “suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka”. (Miriam Budiardjo, 2008/85 : 160)

Carl J. Friedrich mendefinisikan partai Politik adalah “sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil”. (Jurnal TAPIs Vol. 11 No.1 Januari-Juni 2015, hlm 54)

Sigmund Neumann mengemukakan partai politik adalah “organisasi dari aktivis-aktivis yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda”. (Jurnal TAPIs Vol. 11 No.1 Januari-Juni 2015, hlm 54-55/<https://media.neliti.com>)

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa yang disebut dengan partai politik adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh sekelompok orang yang mempunyai, keinginan dan ideologi yang sama, memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, serta berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan secara konstitusional.

2. Pengertian Korupsi

Dalam bukunya Adami Chazawi, yang berjudul *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia* dijelaskan bahwa: “Korupsi dalam bahasa Latin disebut *coruptio* atau *corruptus*, yang disalin ke dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa Inggris disebut *corruption* atau *corrupt*, bahasa Prancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia”. (Adami Chazawi, 2016 : 1). Dalam bahasa Sanskerta yang tertuang dalam naskah kuno Negara Kertagama secara harfiah *corrupt* menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkutkan dengan keuangan (Marwan Effendy, 2013 : 13).

Corruptie dalam bahasa Belanda mengandung arti “perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan oleh Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang memfitnah”. (Adami Chazawi, 2016 : 1).

Perkataan korupsi semula bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya dalam Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1975 tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam konsideran peraturan ini dikatakan antara lain bahwa: “berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos

kemacetan dalam usaha memberantas korupsi dan seterusnya”. (Sudarto, 1977 : 122).

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, “Korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.....” (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).

Henry Campbell, dalam *Black Law Dictionary* memposisikan korupsi sebagai,

“suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain” (Marwan Effendy, 2013 : 13-14).

Dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi, 2003 (United Nation Convention Againsts Corruption 2003, yang telah diratifikasi Pemerintah RI) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, ada beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi, yaitu sebagai berikut:

Penyuapan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi

mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.

Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/swasta/internasional.

Memperkaya diri sendiri secara tidak sah (Aziz Syamsuddin, 2016 : 138).

3. Faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi

Setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini tentu ada yang menyebabkan munculnya peristiwa tersebut. Salah satu kasus yang dapat dijadikan contoh adalah kasus korupsi di Jawa Timur khususnya di kabupaten Malang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Malang menggunakan uang hasil korupsi untuk membayar utang dana kampanye saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2010. Bupati Malang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyediaan sarana Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang (Kompas.com-9/10/2018).

Dari kasus di atas, dapat dilihat bahwa salah satu factor yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi adalah adanya biaya politik yang tinggi yang mesti dikeluarkan oleh calon kepala daerah yang berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah. Ketua DPR. RI Bambang Soesatyo (Harian Kompas, 5 Desember 2018) mengakui “kadang korupsi sukar dihindari, mengingat biaya politik yang tinggi. Bambang mencontohkan untuk menjadi anggota DPR minimal 300 jt sampai miliaran rupiah”. Dengan tingginya biaya politik yang dikeluarkan oleh masing-masing calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan dapat mendorong kepala daerah yang terpilih untuk mencari cara

mengembalikan dana yang telah dikeluarkan dalam pertarungan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tersebut.

Apa yang disampaikan oleh Ketua DPR. RI Bambang Soesatyo dikuatkan oleh Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk, yang membenarkan maraknya praktik korupsi di Indonesia karena biaya politik yang sangat tinggi dan tidak rasional. Akibatnya, demi memenuhi biaya politik, banyak kepala daerah dan anggota legislatif yang tergiur melakukan korupsi (Republika.co.id).

Menurut Aziz Syamsuddin (2016 : 15) beberapa faktor penyebab timbulnya Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), antara lain:

Lemahnya pendidikan moral dan etika;

Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi;

Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (good Gevernance);

Faktor ekonomi (di beberapa negara, rendahnya gaji pejabat publik seringkali menyebabkan korupsi menjadi “budaya”);

Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien; serta

Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyatakan, ada 3 (tiga) faktor dominan yang menyebabkan maraknya praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah.

Onkos politik yang mahal.

Menurutnya sistem demokrasi Indonesia yang dominan ditentukan oleh kuasa partai politik membuat persaingan semakin ketat. Untuk bertarung, dibutuhkan dukungan

logistik dan pembiayaan yang kuat. "Karena orang mau masuk ke sistem politik Indonesia ... harus melalui partai. Untuk masuk kalau bukan orang partai kan ada uang mahar. Suka atau tidak suka praktik itu ada. Dan itu selalu ditanya.

Warisan pemikiran korup di era Orde Baru.

Menurutnya Agus, sebagian besar kepala daerah dilahirkan dan dibesarkan oleh keluarga yang hidup pada era tersebut. Salah satu hal yang paling menonjol adalah sikap permisif melakukan korupsi yang melekat pada waktu itu. "Karena sistem pemikiran kita memang korup zaman Orde Baru.

Rendahnya pendidikan budi pekerti.

Pengembangan karakter seseorang tak hanya cukup mengandalkan pendidikan agama, melainkan juga budi pekerti. Hal itu agar perilaku seseorang terhadap sesama manusia dan Tuhan menjadi seimbang.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/16/09491221/mengapa-kepala-daerah-tak-kapok-korupsi>.

United Nation Convention Against Corruption Tahun 2003 dengan tegas menyatakan, bahwa "pemberantasan tindak pidana korupsi tidak cukup hanya mengedepankan instrumen pidana. Jadi harus dibarengi juga dengan mengatasi atau menyelesaikan factor yang menstimulusnya, yaitu factor yang selama ini menjadi akar permasalahan timbulnya praktek-praktek atau perilaku yang koruptif jika tidak maka mustahil tindak pidana korupsi dapat diberantas". (Marwan Effendy, 2003 : 7)

Dari pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan berpedoman

pada peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya tetapi harus juga dicari dan diselesaikan faktor-faktor yang melatarbelakangi mengapa orang melakukan korupsi.

Sehubungan dengan marak dan masifnya korupsi yang terjadi di Indonesia, Robert Klitgaard menyebut bahwa:

korupsi di Indonesia sudah sampai pada apa yang disebut sebagai "budaya korupsi". Akan tetapi yang dimaksud oleh Robert Klitgaard bukan pada hakikat keberadaan "budaya" atau semua orang Indonesia melakukan tindak pidana korupsi, sehingga sulit untuk diperangi dengan cara apapun, tetapi situasi kondusif dan sikap permisif masyarakat terhadap tindak pidana korupsi menyebabkan perilaku korupsi berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jadi yang dimaksud Robert Klitgaard sebagai budaya karena sudah dianggap biasa seperti dalam kehidupan sehari-hari, dimana untuk mempercepat suatu urusan, seseorang biasa memberikan "uang pelicin" atau kebiasaan memberika uang rokok (Marwan Effendy, 2013 : 23).

4. Peran Partai Politik (Parpol) Dalam Upaya Penanggulangan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tujuan dibentuknya partai politik dapat dilihat dalam pasal 10 UU. No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dimana dalam pasal tersebut tujuan dari partai politik dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

Tujuan umum Partai Politik adalah:

Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan Khusus Partai Politik adalah:

Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;

Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan

Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diwujudkan secara konstitusional (UU. No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik).

Disamping tujuan partai Politik sebagaimana tersebut di atas, dalam pasal 11 UU. No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa:

Partai Politik mempunyai fungsi sebagai sarana:

Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan kebijakan Negara;

Partisipasi politik warga Negara Indonesia; dan

Rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwujudkan secara konstitusional (UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik).

Para ilmuwan politik pada umumnya menggambarkan empat fungsi partai politik, menurut Miriam Budiardjo (dalam Jimly Asshiddiqie, 2016 : 406) keempat fungsi tersebut meliputi, sarana: "(i) komunikasi politik, (ii) sosialisasi politik (political socialization), (iii) rekrutmen politik (political recruitment), (iv) pengatur politik (conflict management)".

Apabila dilihat dari fungsi Partai Politik sebagaimana disebutkan di atas, partai politik merupakan sesuatu yang sangat ideal sebagai perisai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu partai politik memiliki peran sangat penting dalam upaya melakukan tindakan-tindakan untuk menekan dan mencegah terjadinya praktek korupsi. Akan tetapi akhir-akhir ini banyak sorotan public tertuju pada partai politik, mengingat banyaknya anggota partai politik yang terjerat tindak pidana korupsi baik yang duduk di pemerintahan maupun di lembaga legislative.

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap beberapa kepala daerah dan anggota legislative di Indonesia seperti yang terjadi di kabupaten Malang

sebanyak 41 orang DPRD periode 2014-2019 dan beberapa kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Timur (11 kepala daerah kabupaten). Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, “modus korupsi yang terjadi di Jawa Timur tidak berbeda dengan modus yang dilakukan kepala daerah di wilayah lain” (Kompas.com-11-10-2018).

Beberapa lembaga survei menyebutkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parlemen sangat rendah. Begitu juga dengan kepercayaan terhadap partai politik (Parpol). Terlibatnya beberapa kader partai politik dalam tindak pidana korupsi dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap partai politik itu sendiri. Hal ini terlihat beberapa tahun terakhir citra partai politik seakan menurun di mata rakyat, yakni karena banyaknya kader partai politik yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Survei ICW dan Polling Centre (2017) menempatkan DPR, perusahaan, dan parpol ada di kepercayaan publik terendah. Sedangkan survei Poltracking (2017) merilis tingkat kepuasan masyarakat terendah adalah kepada DPR. Gambaran ini menampilkan ironi dalam sistem politik, karena rakyat tidak percaya bahkan pada wakilnya sendiri. Politik dipersepsi sebagai leluasanya kongkalikong antara kebijakan dan kepentingan modal, serta praktik pengumpulan keuntungan pribadi dan kelompok (parpol dan jejaringnya). (Sayfa Auliya Achidsti, Korupsi dan Fenomena Pejabat Offside | Sabtu, 10 Februari 2018 | Dosen Universitas Sebelas Maret, Ketua Riset LPBH PWNU di Yogyakarta)

Korupsi sebenarnya tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang tetapi juga terjadi di negara-negara industri (maju), bahkan hampir semua negara di dunia pernah dilanda korupsi termasuk Indonesia. Korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama dan hampir menyentuh semua lini kehidupan masyarakat. Melihat beberapa kasus Korupsi yang terjadi di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari partai politik (Parpol), sudah sewajarnya Partai Politik dimana mereka bernaung memiliki tanggungjawab moral dalam membina anggotanya.

Menurut Mugiharjo (dalam Marwan Effendy, 2013 : 19), bahwa “korupsi yang terjadi di negara-negara berkembang, karena ada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan oleh petugas atau pejabat negara”. Masood Ahmed, Direktur Pengurangan Kemiskinan dan Manajemen Ekonomi Bank Dunia, “mengingatkan negara-negara miskin bahwa korupsi merupakan perintang utama pertumbuhan ekonomi, karena korupsi membuat para investor menyingkir” (dalam Marwan Effendy, 2013 : 19). Sejalan dengan Masood Ahmed, Fred Bergsten Direktur Institute For International Economics dari Amerika Serikat berpendapat, bahwa korupsi tidak hanya bisa mengganggu pertumbuhan negara yang bersangkutan, tetapi juga bisa menjadi penghambat upaya perdagangan bebas dunia (dalam Marwan Effendy, 2013 : 20).

Sedangkan Soren Davidsen dalam bukunya *Curbing Corruption in Indonesia* (Memerangi Korupsi di Indonesia) menyatakan, bahwa “ ... Korupsi bukan hanya sebagai suatu penyimpangan, tampaknya telah

menjadi suatu norma utama dalam politik ekonomi Indonesia berdekade-dekade. ... korupsi tentu saja telah ada sebelum orde baru namun korupsi menjadi sistemik dan hirarkis adalah ciri utama dalam politik ekonomi orde baru (Marwan Effendy, 2013 : 24). Lebih lanjut Soren Davidsen mengutip pendapat World Bank (Bank Dunia) bahwa:

Transisi politik (Indonesia) telah membuat kompetensi diantara partai politik begitu meluas sehingga memaksa mereka untuk bergantung kepada kaum elit senior (lama) untuk mendapat dana berkampanye yang efektif di wilayah (Indonesia) yang luas ini. Disamping itu sistem desentralisasi telah membuka jalan raya baru bagi para elit daerah untuk melakukan korupsi, karena sebelumnya mungkin mereka tidak mendapat bagian yang “pantas” dari pembangunan di era sistem Indonesia yang sentralistik (Marwan Effendy, 2013 : 24).

Dalam hubungannya dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Mahrus Ali (2013 : 217) menyebutkan, bahwa “terdapat tiga institusi penanggulangan tindak pidana korupsi antara lain : Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketiga Institusi Negara tersebut disamping memiliki fungsi penyidikan juga memiliki fungsi pencegahan dan penanggulangan korupsi”.

Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi mempunyai beberapa fungsi; di antaranya sebagai jembatan penyambung lidah masyarakat terhadap pemerintah dan juga sebagai pencetak kader yang kemudian didistribusikan pada berbagai jabatan publik. Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini, adalah

tersangkutnya beberapa kader partai politik dalam tindak pidana korupsi, hal ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap partai politik itu sendiri.

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Mochtar, menyebut “hingga saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hampir tidak memiliki peran sama sekali dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. DPR justru dinilai semakin membuat para koruptor leluasa melakukan praktik korupsi dengan segala kewenangan yang dimilikinya”.

(<https://www.cendananews.com/2017/03/2017>)

Apabila dicermati dari apa yang disampaikan oleh Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Mochtar memang ada benarnya, bahwa semakin lama semakin banyak pejabat yang berasal dari Partai Politik yang melakukan korupsi di Republik ini. Seperti yang terjadi di beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur, sebanyak 41 (empat puluh satu) orang anggota DPRD kota Malang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi pembahasan APBD Tahun 2015 (Friski Riana, Tempo.Co, 4 September 2018), 11 (sebelas) kepala daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) (David Oliver Purba, kompas.Com, 11 Oktober 2018).

Menyimak apa yang dikatakan oleh Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Mochtar, maka tindakan yang dapat dilakukan oleh partai politik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi antara lain:

Dapat dimulai dari rekrutmen kader sebelum didistribusikan ke berbagai jabatan di pemerintahan. Rekrutmen parpol terhadap individu tentunya yang sesuai dengan visi partai politik yang bersangkutan. Setidaknya individu yang duduk di jabatan pemerintah dapat dikontrol oleh parpol dan juga sebagai simbol partai tersebut. Sehingga semua keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan kepentingan umum dapat diketahui oleh parpol. Hal ini tentunya hanya berlaku pada partai politik yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi.

Partai politik juga bertanggungjawab terhadap kader yang tersangka korupsi melalui tindakan seperti tidak menghalangi penegak hukum pada proses penyelidikan. Kemudian dapat dilakukan tindakan memecatnya sebagai kader partai, dengan catatan ketika sudah menjadi terdakwa dan terbukti melakukannya. (<https://www.kompasiana.com/fahmirf>).

Menurut Soetjipto Rahardjo, bahwa untuk memberantas tindak pidana korupsi, tidak akan cukup atau efektif jika hanya dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum saja, melainkan dibutuhkan juga pendekatan-pendekatan atau tindakan positif di bidang lainnya seperti di bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan politik. Seperti apa yang disampaikan Soetjipto Rahardjo, dapat disimpulkan, bahwa bidang-bidang di luar hukum harus dilibatkan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Termasuk Partai Politik melalui fungsi yang dimilikinya sebagaimana disebutkan dalam UU. No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

PENUTUP

Dari pembahasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa segala upaya dan tindakan melalui berbagai pendekatan telah dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang sudah berjalan bertahun-tahun di negara ini. Oleh karena itu peran partai politik (parpol) melalui fungsi yang dimiliki khususnya di bidang pendidikan politik, dimana peran ketua atau elite partai politik (parpol) sebagai sosok negarawan menjadi sangat penting dalam hal membina dan mengarahkan sikap partai maupun kader-kadernya dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara dengan tidak melakukan praktek korupsi.

Tanggungjawab partai politik (parpol) dapat dimulai dari rekrutmen kader partai sebelum didistribusikan ke berbagai jabatan publik di pemerintahan. Setidaknya kader partai politik (parpol) yang duduk di jabatan pemerintahan dapat dikontrol oleh partai politik (parpol) tersebut, sehingga semua keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat diketahui oleh partai. Hal ini tentu hanya berlaku bagi partai politik (parpol) yang mempunyai komitmen tinggi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Partai politik juga bertanggungjawab terhadap kader yang terlibat tindak pidana korupsi dengan tidak menghalangi penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan.

Partai politik (parpol) hendaknya mempunyai komitmen yang kuat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan memberikan pemahaman kepada setiap kader-kader partai, bahwa

korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang memiliki dampak yang luas dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Partai politik (parpol) hendaknya bertindak tegas untuk mendukung penegakan hukum terhadap anggotanya yang melakukan perbuatan korupsi.

Friski Riana. Tempo.Co. 4 September 2018.

<https://www.cendananews.com/2017/03/2017>

<https://www.dpr.go.id/berita/detai/id/17606/t/parlemen>

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi. (2016). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Pt. RajaGrafindo.

Aziz Syamsuddin. (2016). *Tindak Pidana Khusus*. Cet. V. Jakarta: Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiqie. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. cet. 8. Jakarta: Pt. RajaGrafindo.

Marwan Effendy. (2013). *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*. Jakarta: Referensi.

Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Mahrus Ali. (2013). *asas. Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta. Ull Press.

Sudarto. (1977). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

David Oliver Purba. kompas.Com. 11 Oktober 2018.